

## **BAB 5**

### **FAKTOR PENYEBAB KONFLIK**

#### **ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN**

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif tahun 2004, penyebabnya bisa dijelaskan dari beberapa faktor.

Pada bab ini diuraikan penyebab konflik tersebut yang dibagi menjadi tiga bagian yakni yang bersifat politis, ekonomi-sosial dan budaya.

##### **3.1. Politis**

Munculnya konflik dengan dimensi politis dimaksudkan sebagai konflik yang muncul akibat strategi dan upaya partai dalam mempertahankan diri, atau disebabkan oleh hal politis lain di luar partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, ada tiga faktor yang memunculkan konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan, yaitu adanya persepsi ancaman atas kegiatan partai lain, permiripan ideologis serta kegagalan negara dan partai dalam mengendalikan massa.

##### **3.1.1. Persepsi Ancaman Eksternal**

Dalam pandangan Maurice Douverger, seperti yang dikutip oleh Maswadi Tauf, bahwa konflik antar partai politik itu bisa disebabkan oleh adanya upaya mempertahankan kekuatan diri dari suatu partai politik. Upaya konsolidasi seperti ini akan memancing reaksi dari kelompok lain karena dipandang sebagai ancaman dari luar. Dalam arti, upaya konsolidasi demikian dipandang sebagai adanya

ncaman dari luar oleh partai politik lain yang merupakan kompetitornya. (Rauf, 001: 50)

Konflik antar partai politik yang terjadi di kabupaten Tabanan disebabkan oleh adanya sikap seperti yang diuraikan dalam pandangan diatas. Empat partai yang mempunyai pengaruh cukup besar di kabupaten ini melakukan serangkaian kegiatan menjelang berlangsungnya pemilu legislatif tahun 2004. Partai Golkar, PDI Perjuangan, PNBK serta PNI Marhaenisme melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat basis pendukungnya. Meskipun kampanye masih jauh tetapi partai politik tersebut telah melakukan kegiatan berupa pemasangan atribut partai seperti bendera maupun mendirikan posko di pinggir-pinggir jalan. Partai politik yang baru berdiri seperti PNBK dan PNI Marhaenisme mendirikan sekretariat di desa-desa Tabanan. Kondisi seperti ini sesungguhnya mirip dengan kampanye. Tetapi masa reformasi yang memberikan kebebasan pembentukan partai politik baru serta upaya pembangunan demokrasi, membuat batas-batas norma politik tersebut kabur. Pemerintah dan pihak yang berwenang memberikan ijin kepada partai politik untuk memasang atribut tersebut, jika alasanannya dipandang pantas, seperti misalnya meresmikan pembangunan sekretariat, menyambut kedatangan tokoh partai atau ulang tahun partai. Hampir semua partai politik yang ada di kabupaten Tabanan melakukan tindakan demikian.

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengumpulkan suara paling banyak pada pemilu tahun 1999, melakukan tindakan demikian dengan cara melakukan berbagai safari ke berbagai tempat serta memasang bendera-bendera partai ditempat strategis di jalan umum untuk menyambut kedatangan tokoh partai. Hal yang sama

uga dilakukan oleh Partai Golkar. Sedangkan dua partai lainnya, yaitu PNBK dan PNI Marhaenisme melakukan konsolidasi, pertemuan-pertemuan dengan berbagai pengurus serta membangun sekretariat partai di tingkat kabupaten.

Dari peristiwa yang terjadi, PDI Perjuangan kelihatan sebagai aktor yang selalu hadir dalam konflik yang meletus dengan partai-partai lainnya. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai lain, kelihatan diganggu oleh aktifitas PDI Perjuangan. Meskipun tokoh dan elit partai ini tidak menyebutkan para pengganggu tersebut sebagai aktifitas partainya tetapi dari atribut-atribut yang digunakan seperti misalnya warna merah serta lambang partai PDI Perjuangan menandakan partai itu hadir dalam konflik-konflik antar partai yang terjadi. Ketika Partai Golkar menggelar acara ulang tahun di Padanggalak Denpasar, rombongan Partai Golkar yang berasal dari Kabupaten Jembrana mendapatkan hadangan dari para simpatisan PDI Perjuangan di wilayah Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat. Wilayah ini merupakan perbatasan paling barat dari Kabupaten Tabanan.. Kejadian ini meletus pada tanggal 25 Oktober 2004. Peristiwa bentrokan antar dua partai itu tidak hanya terjadi di daerah Selabih tetapi juga terjadi lebih keras di kota Tabanan dan Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Kali ini melibatkan simpatisan PDI Perjuangan Tabanan dengan simpatisan Partai Golkar Tabanan. Dua tempat ini hanya berjarak sekitar 3 kilometer. Baik di Selabih, kota Tabanan maupun Abiantuwung, konflik tersebut melibatkan ratusan orang. Di kota Tabanan, tercatat beberapa orang terluka parah, dan di Abiantuwung beberapa mobil dan sepeda motor dirusak serta satu rumah dilempari dengan batu.

Meskipun tokoh PDI Perjuangan menyebutkan bahwa konflik itu disebabkan oleh kejadian temporer berupa akibat bertemunya pendukung kedua partai di jalan raya, tetapi jika dilihat dari frekuensi penyerangan oknum-oknum PDI Perjuangan terhadap rombongan Partai Golkar yang hendak menuju Padanggalak Denpasar, memperlihatkan adanya kekhawatiran dari PDI Perjuangan terhadap semakin banyaknya pengaruh partai ini di Kabupaten Tabanan di masa reformasi.

Tanggal 26 Oktober 2003, PDI Perjuangan Tabanan memang hendak melakukan acara relly sepeda motor yang dipusatkan di Soka. Wilayah Soka ini terdapat di Kecamatan Selemadeg, di bagian barat kabupaten Tabanan dan berdekatan dengan Selabih. Sehari sebelum acara berlangsung banyak aktivis PDI Perjuangan berdatangan menuju daerah Soka.

Dari kegiatan ini memang terlihat adanya potensi saling berpapasan simpatisan kedua partai di jalan raya di daerah Soka. Tetapi konflik dan penghadangan tersebut terjadi di Selabih, wilayah yang terdapat sekitar delapan kilometer di arah barat pantai Soka.

Disamping itu konflik dengan Partai Golkar pada waktu itu tidak hanya terjadi di Selabih tetapi juga berlangsung di tempat lain. Konflik juga meletus di pusat kota Tabanan. Sebelum berangkat menuju Denpasar, seluruh simpatisan Partai Golkar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tabanan yang jumlahnya puluhan truk berkumpul di lapangan umum dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh partai. Salah seorang tokoh Partai Golkar dari Kecamatan Kerambitan, N.S., menderita luka parah akibat kejadian ini. Sekitar tiga kilometer ke arah timur dari kota Tabanan, yaitu di Banjar Pasekan, Desa Abiantuwung, ratusan simpatisan PDI

perjuangan menyerbu rumah tokoh Partai Golkar di tempat tersebut. Penyerangan ini dipancing oleh dipasangnya bendera besar di rumah itu. Akibat penyerangan ini kendaraan pribadi dan rumah tokoh rusak berat.

Banyaknya jumlah massa dari Partai Golkar menjadi sasaran dari PDI Perjuangan untuk melakukan serangan tersebut. Bagaimanapun jumlah massa yang banyak berkumpul di satu lapangan sepakbola, mencitrakan bahwa partai ini ternyata masih mempunyai pendukung yang banyak dan setia di kabupaten ini. Disamping itu, kedatangan tokoh-tokoh Partai Golkar juga memperlihatkan bahwa partai ini tetap mampu memperlihatkan eksistensinya di berbagai kecamatan sehingga bisa dipandang sebagai ancaman dari PDI Perjuangan di kabupaten Tabanan. Di Abiantuwung, bendera besar yang terpancang itu terletak di rumah tokoh yang juga merupakan calon anggota dewan dari Partai Golkar. Posisi rumah dengan bendera besar itu sangat kelihatan dari jalan raya Denpasar-Gilimanuk sehingga dilihat dari posisi pesan politik, bendera ini akan mampu menyampaikan pesan politik kepada masyarakat yang melewati jalan raya tersebut. Hari itu, konflik antara kedua partai ini kembali meletus sore harinya di Pesiapan dan Bajra.

Menurut keterangan tokoh Partai Golkar, P.Y., isu penyerangan itu sebenarnya telah di dengar sehari sebelum acara ulang tahun. Mendengar isu penyerangan itu, acara kumpul simpatisan yang sebelumnya hendak dipusatkan di lapangan Debes (Stadion Sepakbola), kemudian dipindah menuju lapangan Dangin Parik, sebuah lapangan umum yang jaraknya sekitar dua kilometer dari rencana sebelumnya. Kendati lokasi sudah dipindah, serangan tetap juga dilakukan. Dengan

melihat keterangan ini, ada indikasi penyerangan itu dilakukan dengan sebuah perencanaan.

Perasaan terancam secara eksternal dari PDI Perjuangan ini juga bisa dilihat dari keberadaan calon anggota dewan di daerah yang bersangkutan. Di Abiantuwung misalnya, di daerah ini ada dua calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Golkar. Potensi untuk mendapatkan pengikut di wilayah ini cukup banyak. Dalam keterangan masyarakat setempat, tiga banjar di Abiantuwung ini, yaitu Banjar Balu, Banjar Tengah dan Pasekan, jumlah pengikut Partai Golkar kelihatan semakin banyak di jaman reformasi.

Ada beberapa hal yang mendukung kecenderungan naiknya potensi dukungan terhadap Partai Golkar di wilayah ini. Dilihat dari latar belakangnya, tokoh Partai Golkar di wilayah ini, yaitu N. R. merupakan figur kharismatik yang sudah masuk Golkar sejak tahun 1960-an. Meskipun tidak menduduki jabatan struktural yang penting di partai tersebut, N.R. pernah menjabat sebagai ketua KUD Kediri selama hampir satu dasawarsa. Ia juga berposisi *pemangku* (pemimpin upacara dalam sebuah pura Hindu), dan pernah menjabat sebagai pemimpin adat (kelihan adat di banjar tersebut). Pengalaman seperti ini membuat pengaruhnya cukup besar di masyarakat.

Disamping itu, bersebelahan dengan kampung ini secara kebetulan ada persoalan adat yang cukup pelik. Di Dusun Yangapi ada persoalan berupa pembagian kuburan yang masih belum jelas antara beberapa penduduk setempat. Masalah adat ini sempat menimbulkan kerusuhan fisik yang masih belum bisa terselesaikan hingga sekarang. Konflik internal di wilayah ini sudah berlangsung

ampir dua tahun. Meskipun ini bukan merupakan persoalan politik, tetapi diduga mempengaruhi sikap masyarakat. PDI Perjuangan yang berhasil memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 1999, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut sehingga berlangsung lebih dari setahun. Kendatipun demikian, tokoh PDI Perjuangan yang juga menjadi anggota legislatif yang berasal dari wilayah ini telah melakukan pendekatan dan berkunjung ke wilayah konflik adat tersebut. Kekecewaan terhadap berlarutnya masalah Yangapi ini kemungkinan mempunyai pengaruh besar terhadap sikap masyarakat. Dalam keterangan beberapa penduduk di wilayah ini memperlihatkan sikap bahawa konflik tersebut cukup menakutkan menyebar ke banjar-banjar lainnya. Mereka juga ketakutan dengan sikap beberapa simpatisan partai merah yang sering melakukan konvoi ramai-ramai dengan ugai-ugalan. Kedua pernyataan sikap ini bisa dikaitkan karena mereka sama-sama takut dengan kekerasan.

Di Banjar Pasekan tempat dari N.R. bermukim dan Banjar Balu di kelurahan Abiantuwung, terjadi peningkatan pengikut Partai Golkar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kebijakan Partai Golkar yang sering melakukan pengarahannya kepada masyarakat membuat pengikut partai ini cukup meningkat. Hal ini setidaknya terlihat dari aktifitas pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh simpatisan partai tersebut. Pada saat yang sama. Pada pemilu 2004 terbukti bahwa pengikut partai ini berlipat di wilayah tersebut. Menurut catatan panitia pemilihan tingkat kebendesaan Abiantuwung, tahun 1999 jumlah pemilih Partai Golkar sebanyak 80 orang. Tetapi pada pemilu legislatif 2004, jumlah pemilih partai ini meningkat lebih dua kali lipat, menjadi 218 suara. Pada waktu yang sama, jumlah pemilih PDI Perjuangan di banjar

ini merosot lebih dari setengahnya. Tahun 1999 pemilih PDI Perjuangan berjumlah 361 suara, tetapi pada pemilu legislatif 2004, jumlah ini merosot menjadi 666 suara. Melonjaknya suara Partai Golkar lebih dari 200% dan kemerosotan sampai melebihi 50% dari pemilu 1999 merupakan ancaman serius bagi PDI Perjuangan di panjar tersebut.

Dengan kondisi demikian, secara politik bisa dikatakan PDI Perjuangan merasa terancam posisinya untuk wilayah Desa Abiantuwung ini. Karena itu ketika melihat adanya bendera Partai Golkar yang besar berkibar, maka secara spontan massa PDI Perjuangan yang beriringan di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk pada waktu itu spontan berbelok menuju rumah tokoh ini menurunkan bendera Partai Golkar. Menurut N.R., tidak dijumpai adanya aktivis PDI Perjuangan setempat yang melakukan pengrusakan. Tetapi kata-kata ayang dikeluarkan menyerang yang jumlahnya ratusan tersebut menginginkan melenyapkan tokoh-tokoh Partai Golkar di daerah ini.

Jika dilihat ke belakang, persepsi ancaman eksternal ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya kesepakatan politik (wacana politik) yang pernah dikeluarkan PDI Perjuangan pada tanggal 19 Januari 2003. Pada waktu itu para simpatisan dan pentolan partai ini melakukan pertemuan di sebuah tempat di Tabanan yang mengeluarkan dua kesepakatan politik, yang pertama membubarkan Partai Golkar yang dinilai menyengsarakan rakyat. Kesepakatan kedua, membuat Tabanan ke dalam satu panji, yaitu PDI Perjuangan. Berkumpulnya simpatisan dan tokoh partai ini merupakan reaksi atas safari Partai Golkar yang dilakukan sehari sebelumnya,



yang melakukan perjalanan keliling Bali. Massa PDI Perjuangan asal daerah Selemadeg menghadang simpatisan Partai Golkar yang datang dari Jembrana.

Wacana politik kedua, yaitu upaya membuat seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan ke dalam satu panji PDI Perjuangan bisa ditafsirkan sebagai upaya mirip dengan apa yang dilakukan di jaman Orde Baru dulu, yaitu Golkarisasi atau Kuningisasi, yang mana dalam konteks pemikiran PDI Perjuangan seluruh masyarakat di kabuapten ini harus masuk ke dalam partai itu. Pernyataan politik, meskipun ini hasil cetusan PDI Perjuangan semata, tetapi mempunyai implikasi yang besar bagi simpatisan partai ini, baik yang ada pada tingkat akar rumput level menengah maupun elit-elit tertentu. Satu panji itu bisa dimaknakan sebagai Kabupaten Tabanan harus mutlak di bawah PDI Perjuangan sehingga tidak dibenarkan adanya partai-partai lain di luar partai tersebut. Beberapa simpatisan partai ini sempat menyebutkan bahwa dengan satu panjinya Tabanan ke dalam partai tersebut akan memudahkan pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Inilah yang bisa menimbulkan bahaya politis, seperti merembaknya kerusuhan atau gangguan terhadap aktivitas partai lain karena partai-partai itu dipandang sebagai ancaman eksternal.

Setelah ada kesepakatan tersebut, kelihatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Tabanan selalu mendapat gangguan dari PDI Perjuangan. Bulan April, upaya Golkar mensponsori bangunan bale banjar di Kutuh Kelod, Kecamatan Kerambitan juga mendapat gangguan dengan alasan ijin pertemuan tidak ada. Di Banjar Tunjuk Kelod, bendera Partai Golkar yang berdiri di

pelemparan rumah tokoh diturunkan secara paksa. Seorang simpatisan partai ini juga dipukuli oleh simpatisan PDI Perjuangan.

### 1.2. Kemiripan Ideologis

Perasaan terancam PDI Perjuangan semakin kelihatan karena gangguan yang dilakukannya tidak saja terhadap Partai Golkar tetapi juga kepada partai-partai lain terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Meskipun dua partai ini merupakan partai baru, yang tidak ikut dalam pemilu tahun 1999, tetapi kegiatan dua partai ini selalu mendapatkan pengawasan dan dirusak oleh simpatisan PDI Perjuangan.

Dalam pandangan Anthony Downs, seperti yang dikutip oleh Ketut Putra Erawan bahwa konflik antar partai politik bisa terjadi di suatu daerah apabila di daerah tersebut didominasi oleh partai politik yang mempunyai ideologi sejenis atau arah ideologi yang tidak terlalu jauh. Ini terjadi karena partai-partai yang mempunyai ideologi yang berdekatan tersebut berupaya merebut massa pemilih dalam satu wilayah (Putra Erawan, 2004: 36).

Ideologi PDI Perjuangan, PNBK dan PNI Marhaenisme boleh dikatakan berdekatan karena sama-sama nasionalis dan mengandalkan kharisma Soekarno atau keluarga Soekarno sebagai upaya meraih massa. Karena adanya kemiripan seperti ini bukan tidak mungkin kemudian PDI Perjuangan merasa terancam dalam hal memperoleh dukungan di Kabupaten.

Sebagai partai yang baru berdiri dan dimungkinkan baginya untuk mengembangkan diri, PNI Marhaenisme maupun PNBK juga melakukan langkah

ntuk memperkenalkan diri dan mengkonsolidasi partai. Kegiatan-kegiatan seperti ulah yang mendapatkan gangguan. Dalam alasan yang dikemukakan oleh salah seorang pengurus PNI Marhaenisme di Banjar Bongon Lebah, M.S., konflik terhadap partainya terjadi karena partai inilah yang berani melakukan konvoi ketika hendak mendirikan sekretariat partai. Konvoi yang dilakukan secara terang-terangan itu, dengan mengusung nama Soekarno, dipandang mampu menggoyahkan eksistensi PDI Perjuangan, bukan saja di banjar yang bersangkutan tetapi juga di Kabupaten Tabanan. Dalam pandangan elit PDI Perjuangan, gangguan yang dilakukannya terhadap kegiatan PNI Marhaenisme tersebut semata-mata disebabkan oleh karena tidak dijalankannya prosedur secara benar dalam mendirikan sekretariat, seperti tidak memiliki gedung yang jelas, tidak memiliki alat-alat sekretariat (meja, kursi dan sebagainya), juga tidak memberitahukan kepada perangkat desa. Meskipun alasan ini benar, tetapi secara prosedural juga, bukan simpatisan PDI Perjuangan yang mestinya melakukan perusakan terhadap sekretariat partai, tetapi telah ada lembaga yang lebih berwenang, yaitu Kesbang Linmas (Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat). Menurut elit PNI Marhaenisme tersebut ijin itu sebenarnya sudah didapatkan. Tetapi banyaknya datang simpatisan partai yang memakai baju merah itu telah menghancurkan sekretariat yang telah didirikan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kehadiran PNI Marhaenisme, meskipun partai ini baru berkecimpung di kabupaten Tabanan, merupakan ancaman bagi PDI Perjuangan. Ancaman tersebut diprsepsikan besar karena partai ini mempunyai ideologi mirip dengan PDI Perjuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Konflik yang terjadi di Banjar

Kegagalan Kaja pada bulan Februari 2003, disebabkan oleh ketersinggungan aktivis PDI Perjuangan karena dinilai masyarakat di wilayah tersebut telah beralih menjadi anggota PNBK. Ketika ada peresmian kantor kepala desa di banjar tersebut, tidak banyak masyarakat yang datang menghadiri peresmian yang dilakukan bupati. Bupati Tabanan adalah sokongan dari partai ini. Itulah yang menyebabkan ketika ada rapat konsolidasi PNBK di rumah W.W., pemimpin partai, rumahnya dilempari oleh simpatisan PDI Perjuangan, termasuk juga tempat sembahyang dari keluarga.

Secara historis, baik keluarga MS di Bongan Lebah maupun WW di Kegalinggah mempunyai riwayat kepartaian yang cukup lama. MS menyebutkan ayahnya adalah bekas anggota PDI sejak jaman Surjadi dan keluarga WW adalah aktifis partai banteng sejak jaman Soekarno. Ketika ada berbagai intimidasi pada jaman Orde Baru keluarga W.W. juga pernah diancam dan mereka tidak surut membela partai banteng. Alasannya kemudian keluar dari PDI dan kemudian mendirikan cabang PNBK akibat dua hal, yaitu tidak menyukai simpatisan PDI Perjuangan yang banyak ugai-ugalan serta kepemimpinan PDI Perjuangan di tingkat pusat dinilai tidak mempunyai jiwa nasionalis. Beralihnya Pulau Sipadan dan pengalihan ke tangan Malaysia disebutkan sebagai ketidaknasionalisan pemimpin partai di tingkat pusat.

### **1.3. Kegagalan Negara dan Elit Partai Mengontrol Massa**

Konflik yang terjadi antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan juga bisa dilihat dari sisi lain, yakni bagaimana negara dalam menangani konflik tersebut serta upaya elit untuk mengontrol massanya ketika terlibat konflik. Pada

kekuatannya, jika dilihat dari strukturalnya, konflik antar partai politik ini merupakan konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara lapisan sosial masyarakat yang sejajar, yakni partisan kontestan pemilu. Kekerasan jenis ini bisa terjadi akibat campur tangan negara dalam memicunya tetapi negara sendiri tidak ikut terlibat dalam konflik yang terjadi. Kekerasan demikian juga bisa muncul akibat tidak dilakukannya fungsi negara sebagai penjamin diselesaikannya konflik secara damai. Lemahnya kekuatan negara menyebabkan terjadinya suatu situasi yang mengarah pada *anomi*, yaitu ketika nilai-nilai lama telah hilang, sementara nilai baru belum terdapat. Lemahnya kekuatan negara juga menyebabkan lemah atau kurang berfungsinya hukum positif, yang memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, dalam hal ini adalah pelaku tindak kekerasan. Dengan kata lain, negara mengabaikan tugas utamanya sebagai pemelihara keamanan masyarakat. Karena tidak berlakunya prinsip-prinsip yang mengandung sanksi seperti itu, maka berkembanglah apa yang disebut dengan prinsip *impunity*, yaitu berkembangnya kejahatan akibat tidak dihukumnya pelaku (Sulistyo, 2000: 60-61)

Dengan kata lain, negara mengabaikan tugas utamanya sebagai pemelihara keamanan masyarakat.

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, kelihatan semakin marak setelah adanya rapat deklarasi bersama dari simpatisan PDI Perjuangan yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati Tabanan. Rapat yang dihadiri oleh sekitar 300 simpatisan partai itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk front penyelamat dan pemersatu daerah Tabanan serta kesepakatan

politik berupa membubarkan Partai Golkar. Selanjutnya mengharuskan Tabanan ada dalam satu panji, yaitu PDI Perjuangan.

Disini yang perlu dilihat adalah keterlibatan simbol negara berupa kantor bupati Tabanan yang dipakai untuk rapat. Kantor tersebut merupakan milik negara yang bisa dipandang secara keliru oleh simpatisan partai sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap partai lain jika dikaitkan dari kesepakatan politik yang dihasilkan pada saat itu. Menurut elit politik PDI Perjuangan, I.S. yang terlibat dalam pertemuan, kesepakatan itu hanya merupakan seruan yang bersifat politis untuk perjuangan partai, tetapi massa yang beragam dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan tersebut bisa berbuat menyimpang diluar kendali norma-norma hukum dan norma sosial yang ada. Dengan demikian, simbol-simbol negara ini bisa dikatakan ikut memicu munculnya konflik antar partai tersebut.

Disamping itu, sejak awal tahun 2003, konflik yang melibatkan beberapa partai politik, tidak mendapatkan penanganan secara maksimal dari pihak keamanan beserta pihak terkait di daerah kabupaten Tabanan. Menurut keterangan tokoh dan pimpinan partai politik yang terlibat dalam konflik, pihaknya telah melaporkan kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa partai serta sipmatisannya. Pimpinan partai yaitu W.W. yang merupakan ketua PNBK, dan M.S. tokoh PNI Marhaenisme, menyebutkan pihaknya telah melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Tetapi pengusutannya tidak tuntas. Memang pihak kepolisian datang ke tempat jam setengah malam setelah kejadian. Tetapi proses hukumnya tidak berlangsung. Mereka ditahan di kantor polisi beberapa hari tetapi kemudian pelaku kekerasan tersebut bisa dilepaskan. Alasan senada juga diungkapkan oleh tokoh Partai Golkar yang ada di

Dusun Tunjuk Selatan, W.S., serta beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui alur peristiwa tersebut. Seorang anggota kepolisian resort Tabanan juga mengakui hal demikian. Pihak keamanan sebagai alat negara, dengan demikian, bisa dikatakan telah gagal dalam rangka menyelesaikan konflik secara damai dan justru memicu tumbuhnya konflik-konflik baru ke depan. Pelaku kerusuhan merasa tidak mendapat hukuman berat terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan.

Kejatuhan Orde Baru dukungan Golkar pada tahun 1998 membuat PDI Perjuangan menjadi partai yang paling mendapatkan hati di sebagian besar masyarakat. Pada sisi lain, para pejabat partai ini kelihatan belum siap mengantisipasi lonjakan pengikut yang munculnya tiba-tiba. Setelah sebelumnya masyarakat terkena pengaruh Golkar baik karena institusi maupun kebijakan politik, pada waktu reformasi bergulir di Indonesia tiba-tiba hal itu menjadi berbalik.

Dalam bidang politik, kejatuhan Orde Baru dan berbagai kebijakan yang diterapkan selama berkuasa menimbulkan perasaan kecewa dan dendam bagi masyarakat. Akibatnya setelah reformasi muncul pembalasan-pembalasan politik, terutama dari masyarakat yang sebelumnya dikecewakan oleh kebijakan Orde Baru. Tetapi pada sisi lain, secara intelektual PDI Perjuangan belum siap menghadapi lonjakan pendukung yang demikian tiba-tiba. Hal seperti ini juga kelihatan pada kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan sampai pada kepengurusan tingkat cabang hingga pada tingkat ranting. Bahwa PDI Perjuangan kewalahan mengatur massa akar rumputnya, telah diakui oleh elit partai ini. Salah satunya oleh P. Meskipun demikian, ia telah mengutarakan bahwa dalam tingkat kabupaten, upaya mengendalikan akar rumput itu telah dilakukan dengan memberikan ceramah-

ceramah yang dilakukan oleh elit partai. Disebutkan jika elit partai tingkat kabupaten melakukan kunjungan ke desa, selalu mendapatkan sambutan meriah. Pada saat itulah ceramah dan program-program diperkenalkan kepada massa akar rumput. Tetapi tetap juga dikatakan selalu ada kesulitan untuk mengontrol massa akar rumput, terutama jika ada acara-acara seremonial yang digelar, seperti konvoi dalam rangka meresmikan posko tertentu, akan selalu dijumpai rombongan dengan jumlah yang melebihi dari yang diperkirakan.

Tetapi menurut elit partai ini, juga diakui bahwa seperti halnya dengan partai-partai lain, dalam tubuh PDI Perjuangan pun terdapat kelompok-kelompok elit yang bisa dikategorikan dengan kelompok radikal dengan kelompok moderat. Menurutnya, kendatipun dalam tubuh partai ada kelompok yang berpandangan radikal, tetapi mereka mempunyai sifat solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi. Akibatnya mereka-mereka yang bersifat radikal tersebut tetap mempunyai massa pengikut dengan kualifikasi yang sama (radikal juga). Kualifikasi itu misalnya berasal dari kelompok yang termarginalkan pada masa Orde baru (pernah ditahan dan sebagainya), pengangguran, kurang terdidik, penjudi dan secara ekonomi kurang mampu. Karena kurang terdidik itu, maka pemahaman mereka terhadap etika maupun politik juga kurang, sering bersikap beringas dan keras dalam menghadapi sesuatu masalah. Konflik-konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan partai lainnya lebih banyak disebabkan oleh sikap spontan oleh kelompok masyarakat dari golongan seperti ini. Golongan moderat dalam tubuh PDI Perjuangan dalam hal konflik partai ini, sering merasa kecolongan. Dalam strategi kebijakan partai, golongan moderat ini



menurut S.P. malah sering membela dan menghalangi upaya-upaya menghancurkan sarana partai lain.

S.P. menyebutkan bahwa ketika ada upaya untuk menghancurkan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tabanan, pihaknya berupaya mencegah dan berhasil menghindarkan kehancuran kantor tersebut dari amukan massa akar rumput PDI Perjuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I.S. salah seorang elit PDI Perjuangan yang tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi dan sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai pegawai bank. Tokoh ini secara diplomatis mengatakan bahwa pihaknya berhasil mencegah massa PDI Perjuangan yang berupaya membubarkan secara paksa pertemuan elit Partai Golkar yang hendak menyerahkan bantuan keuangan kepada masyarakat Kutuh Kelod tanggal 27 April 2003. Pertemuan berhasil dihentikan dan penyerangan tidak terjadi.

Dalam pandangan I.S. walaupun ada konflik antar partai yang disebabkan oleh tidak terkendalinya massa partai ini pada tingkat akar rumput, bisa dijelaskan dengan pemahaman bahwa pada tingkat akar rumput itu ada massa yang bisa dikualifikasikan dengan beberapa kelompok. Kelompok pertama disebutkannya sebagai massa yang rasional. Massa ini terdiri dari kelompok masyarakat yang secara edukatif, terdidik dan benar-benar memahami perjuangan partai termasuk tidak terlalu berambisi menjadi elit partai. Mereka memahami partai dengan akar historisnya dari pendiri bangsa, yaitu Soekarno. Mereka tidak akan membikin onar termasuk tidak melakukan bentrok dengan partai-partai lain. Kemudian ada massa fanatik. Massa seperti ini disebutkannya sebagai massa yang fanatik terhadap partai yang bisa bergerak secara serampangan terhadap partai dan terhadap tokoh partai yang menjadi

ujungannya. Kefanatikan itu akan membutakan norma-norma yang ada dan cenderung menimbulkan kerusuhan jika berhadapan dengan partai lain. Selanjutnya ada massa yang berkualifikasi ikut-ikutan. Kelompok ini sangat susah diantisipasi. Karena kelompok massa seperti ini bisa muncul secara tiba-tiba pada saat ada kegiatan partai dan sering menimbulkan nilai negatif terhadap citra partai.

Dalam pandangan I.S. massa seperti inilah yang paling ditakuti. Sebab, jika massa akar rumput PDI Perjuangan yang berkualifikasi fanatik bisa dikumpulkan dan diarahkan, massa ikut-ikutan seperti ini susah dilacak. Malah bisa dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu untuk mencoreng citra PDI Perjuangan. Sebaliknya massa seperti ini sering dipakai berkelit oleh elit PDI Perjuangan dengan mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di daerah tertentu, tidak dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan karena pelakunya tidak dikenali. Elit PDI Perjuangan yang lain, yaitu M.P. membenarkan adanya pengelompokan massa akar rumput seperti itu tetapi kemudian menambahkan bahwa ada juga massa bayaran. Artinya kelompok yang ikut melakukan kerusuhan tetapi dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu, baik itu oleh elit PDI Perjuangan maupun oleh partai lain dengan tujuan mencoreng citra PDI Perjuangan.

## **2. Ekonomi-Sosial**

Penyebab konflik yang berdimensi ekonomi-sosial, dimaksudkan bahwa konflik tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi diantara masyarakat. Tetapi juga termasuk upaya-upaya untuk meraih tujuan ekonomi dan sosial juga bisa

menyebabkan konflik. Dalam konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, dua faktor yang mempengaruhi itu yaitu *deprivasi relatif* dan upaya memperebutkan posisi langka.

### 3.2.1. *Deprivasi Relatif*

Konsep *deprivasi relatif* dikeluarkan oleh Ted Gurr yang menegaskan bahwa pemberontakan politik dan pembangkangan lainnya terjadi bila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya. Untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus kekecewaannya, kelompok yang bersangkutan mengambil jalan agresi dan kekerasan politik. Kondisi kemiskinan dan penindasan obyektif atau absolut, tidak langsung mengakibatkan pemberontakan. Melainkan tanggapan subyektif atau psikologis atas kondisi-kondisi itulah yang mengobarkannya. Studi statistik memperlihatkan bahwa kekerasan cenderung meningkat selama masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Jones, 1993: 202).

Kondisi demikian dalam kerusuhan antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, lebih banyak terlihat pada bentrokan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Poin pertama dari kesepakatan politik yang dilakukan PDI Perjuangan pada tanggal 19 Januari 2003 memperlihatkan bagaimana kekecewaan simpatisan PDI Perjuangan terhadap Golkar yang memegang pemerintahan pada masa Orde Baru. Poin dalam kesepakatan politik partai itu menyebutkan bahwa Golkar mempunyai dosa terlalu besar yang membuat masyarakat Tabanan resah dan sengsara. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kecewanya para simpatisan PDI Perjuangan terhadap perilaku Orde Baru.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh PDI Perjuangan, pernyataan tersebut hanyalah sebuah ungkapan politis yang sebenarnya hanya untuk simpatisan partai tersebut. Tidak ada maksud untuk menghilangkan eksistensi Partai Golkar di kabupaten ini. Namun demikian, dalam pernyataannya juga menyebutkan bahwa yang hadir dalam pertemuan itu ratusan kader PDI Perjuangan yang berasal dari daerah-daerah pertanian yang miskin dimana masyarakatnya juga terlihat kekurangan secara ekonomi, seperti dari daerah pantai yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Ketika terjadi penghadangan terhadap safari Partai Golkar maupun ketika menghadiri acara ulang tahun di Padanggalak, Denpasar, simpatisan yang mengenakan atribut PDI Perjuangan banyak yang berasal dari wilayah-wilayah seperti ini. Meskipun dalam pernyataan yang dikemukakan para elit politiknya bahwa pihaknya tidak ada mengerahkan massa, dari sisi lain bisa dilihat bahwa kehadiran massa lapis bawah yang hadir menghadang simpatisan Partai Golkar saat itu bisa menjelaskan bagaimana kecewanya mereka dengan janji-janji Partai Golkar.

Selama masa Orde Baru, wilayah pantai di bagian selatan kabupaten Tabanan, cukup menderita. Jalan raya menuju pantai Yeh Gangga, yaitu wilayah pantai tersebut, tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan dari pemerintah. Pada masa Orde Baru, dimana Golkar menjadi pendukungnya janji-janji yang diberikan oleh pemerintah baik melalui media massa maupun oleh pejabat pemerintah akan perbaikan di desa, sudah menjadi lumrah. Tetapi jalan raya yang menghubungkan desa-desa pantai sangat jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan oleh dikatakan tidak pernah dilakukan perbaikan. Meski demikian, wilayah ini tetap

lipandang sebagai pendukung partai banteng. Karena itu, kekecewaan kepada Partai Golkar berupa bentrokan yang terjadi di Pesiapan saat ulang tahun itu, bisa dilihat dari pemikiran seperti ini. Malah dalam laporan pihak kepolisian, meskipun dijaga dengan pagar hidup (barisan kepolisian dengan tameng), massa PDI Perjuangan tetap merengsek menerobos barisan tersebut dan melempari simpatisan Partai Golkar yang lewat. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memperlihatkan bahwa pelaku-pelaku dari kerusuhan itu, banyak yang berasal dari kaum marginal.

### 5.2.2. Upaya Menguasai Posisi Langka

Dalam kebanyakan konflik antar partai politik yang melibatkan PDI Perjuangan, menurut catatan laporan kepolisian, elit-elit partai ini atau barang kepemilikan dari elit partai ikut terlibat di lapangan. Artinya mereka berada ketika konflik itu terjadi. Ini menandakan disamping elit tersebut menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan ancaman serta perkembangan partainya, ada alasan lain yang ikut mempengaruhi. Dilihat dari latar belakangnya, elit tersebut sesungguhnya telah menduduki jabatan politik sebagai anggota dewan atau sebagai tokoh dalam partai. Tetapi tidak semua dari tokoh itu yang mempunyai latar belakang ekonomi sosial yang mapan. Cukup banyak dari mereka yang berasal dari kalangan petani, penjudi, karyawan swasta ataupun pedagang kecil-kecilan. Karena itu kehadirannya saat menghadapi aktivitas partai lain atau mempersoalkan keberadaan atribut partai lain, adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan tanggungjawab dan loyalitas sebagai anggota PDI Perjuangan.

Tetapi jika dilihat dari sisi lain, bisa dikatakan sebagai upaya untuk merebut dan mempertahankan posisi struktural tersebut dalam partai maupun pemerintahan sebagai anggota dewan). Posisi sebagai elit partai maupun anggota dewan jelas lebih baik dan menguntungkan dibanding dengan profesi sebelumnya.

Menurut Mack dan Snyder, sebagaimana dikutip oleh Tedd Robert Gurr, konflik itu bisa terjadi disebabkan adanya upaya-upaya untuk mendapatkan kontrol sumber-sumber dan posisi-posisi yang langka atau untuk mempengaruhi perilaku dengan tujuan-tujuan tertentu (Rauf, 2001: 6). Posisi sebagai elit partai maupun sebagai anggota dewan adalah posisi langka dalam masyarakat. Tetapi jika mendapatkan posisi tersebut, disamping mampu meraih penghasilan ekonomi yang lebih besar dari masyarakat pada umumnya di Indonesia, juga bisa dipakai untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh tertentu.

Dengan demikian, keberhasilan untuk menghalangi langkah partai lain agar tidak menjadi ancaman bagi partainya sendiri, akan mendapatkan nilai tertentu terhadap elit yang mampu menggerakkan massanya, meskipun hal itu menimbulkan kondisi konflik. Bisa juga dikatakan bahwa secara tidak langsung, hal itu merupakan upaya untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Dalam hal ini adalah uang, karena penghasilan anggota dewan lebih besar dan pasti. Berposisi sebagai elit partai maupun anggota legislatif akan mampu membuat pengaruh. Misalnya membuat jalan raya dan perbaikan kampung di daerah anggota partai yang bersangkutan. Atau membuat kebijakan pertanian tertentu, atau justru membela hak-hak kaum marginal. Setelah pemilu, tercatat kemudian tokoh partai seperti S tetap menjadi anggota

ewan dan kemudian terpilih dengan suara mayoritas untuk memimpin partai ini. Elit lain, DA terpilih menjadi anggota dewan untuk daerah tingkat I.

Ketika di peraturan daerah anti perjudian diundangkan di Bali, menurut keterangan beberapa pihak, anggota-anggota legislatif daerah Tabanan yang mempunyai latar belakang aktifitas judi, mencoba menghalangi pemberlakuan peraturan daerah tersebut.

### 5.3. Budaya

Dimensi budaya yang dimaksudkan disini adalah budaya-budaya atau kebiasaan yang berlaku secara temurun di dalam masyarakat yang berpotensi memicu munculnya konflik. Meskipun budaya tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekerasan tetapi penafsiran yang keliru mampu mendorong terciptanya konflik. Di Tabanan, dijumpai adanya budaya tajen, minuman keras serta semboyan-semboyan kultural yang mampu menggerakkan solidaritas massa.

#### 5.3.1. Budaya Kekerasan

Menjelaskan konflik antar partai politik di kabupaten Tabanan, juga bisa dilihat dari adanya unsur budaya yang mengandung unsur kekerasan di dalam masyarakat. Menurut Hermawan Sulistyو dalam menjelaskan fenomena kekerasan antar partai politik bisa dilihat dari budaya yang mengandung unsur kekerasan di tingkat masyarakat. Misalnya yang terjadi di daerah Madura, Jawa Timur dalam pemilihan umum 1999 yang lalu, munculnya konflik bisa dilihat dari adanya budaya kekerasan dalam masyarakat setempat. Budaya carok misalnya akan

mendukung munculnya kekerasan yang terjadi antar kontestan partai politik pada kampanye tersebut. Dalam kaitan ini juga disebutkan adanya unsur yang mendukung budaya kekerasan tersebut, seperti membawa senjata tajam dan sebagainya (Sulistyo, 2000: 13)

Dalam kasus konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan ini, budaya kekerasan itu teradaptasi dari adu ayam jago (*tajen* dalam bahasa daerah Bali) dan kebiasaan minum-minuman keras. Jika dilihat dari upaya penyelesaian konflik, sabungan ayam sesungguhnya merupakan penyelesaian masalah yang bersifat *zero sum* konflik. Artinya penyelesaian dilakukan sampai salah satu pihak berhasil mencapai kemenangan dengan menghilangkan pihak yang lain.

Dikaitkan dengan fenomena demikian, dari keterangan-keterangan yang dikumpulkan di lapangan, baik dari masyarakat biasa, elit partai politik maupun tokoh politik sesungguhnya banyak dari para pelaku dari konflik ini berasal dari para gebotoh yang suka menggelar aduan ayam. Hal itu tidak saja terlihat dari simpatisan PDI Perjuangan tetapi juga simpatisan Partai Golkar serta beberapa simpatisan PNI Marhaenisme. Menurut keterangan masyarakat setempat serta perangkat desa yang dihubungi, konflik antar PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Tunjuk, dikenal konflik antara para penggemar sabungan ayam. Di sini yang dilihat adalah metode penyelesaian masalahnya yang dipakai, yakni berupaya mengalahkan atau bahkan menghilangkan salah satunya agar kemenangan berada di pihaknya. Cara demikian merupakan adaptasi permainan *tajen* dimana apabila salah satu ayam dikatakana menang, berarti yang lainnya mati. Seorang simpatisan Partai Golkar di wilayah



Unjuk dikeroyok oleh massa PDI Perjuangan. Konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di daerah Selemadeg juga disebutkan banyak melibatkan simpatisan PDI Perjuangan yang sebelumnya dikenal sebagai bebotoh tajeun. Sedangkan menurut tokoh Partai Golkar di Abiantuwung, N.R., ketika rumahnya diserbu oleh massa yang memakai baju merah dan hitam, disamping melempari rumahnya para penyerang itu mengacungkan senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata hendak membunuh tokoh Partai Golkar yang ada.

Menurut salah seorang saksi, pegawai pemda yang sering mengikuti perjalanan partai politik, J, disebutkan budaya kekerasan tersebut seolah sengaja diciptakan. Sebelum melakukan arak-arakan partai, massa partai akan berkumpul dulu dan kemudian meminum minuman keras. Jika kondisinya sudah dalam keadaan mabuk, mereka akan melakukan perjalanan konvoi dengan tujuan tertentu. Kondisi setengah sadar seperti ini akan membuat simpatisan partai ini akan berani melakukan apa saja, sesuai dengan arus emosi yang ada pada saat itu. Menurut J, saat dirinya melakukan tugas kantornya, ia pernah disodori kelewang oleh massa simpatisan partai yang sedang marah. Ini artinya dalam konvoi tersebut, senjata tajam juga dibawa.

Elemen kekerasan tersebut juga terlihat pada Partai Golkar. Beberapa simpatisan dan elit PDI Perjuangan menyebutkan bahwa ketika terjadi konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di di daerah Selemadeg, simpatisan ini menemukan adanya batu yang sudah dipersiapkan untuk menghancurkan posko-posko PDI Perjuangan yang ada di daerah itu. Pengerusakan posko PDI Perjuangan oleh simpatisan Partai Golkar terjadi pada sore hari setelah partai tersebut selesai

menghadiri acara ulang tahun di Denpasar. Pelemparan dilakukan ketika kendaraan sedang berjalan. Ini artinya senjata-senjata untuk melakukan pelemparan, memang telah dipersiapkan sebelumnya.

Unsur budaya kekerasan yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu ini akan bertambah kuat penampakkannya apabila tokoh dan elit dari kelompok tersebut, secara psikologis juga memperlihatkan sifat demikian. Konflik politik pada tingkatnya merupakan konflik kelompok. Apabila kelompok-kelompok itu dipimpin oleh seorang tokoh yang mempunyai kebiasaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, maka kemungkinan sifat individu ini akan mampu menyeret anggota kelompoknya untuk ikut berkonflik dengan yang lain. Menurut Maswadi Rauf, sifat psikologis (seperti suka kekerasan) dari pemimpin disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Salah satunya akibat psikologis dari faktor lingkungan itu adalah frustrasi. Ini dipandang sebagai faktor psikologis (Rauf, 2001: hal 49).

Dilihat dari konteks demikian, kekerasan-kekerasan yang dimunculkan oleh simpatisan PDI Perjuangan ini disebabkan oleh beberapa elitnya yang mempunyai sifat demikian. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah konflik, juga dengan elit struktural PDI Perjuangan serta dengan elit dan simpatisan partai yang berkonflik dengan PDI Perjuangan, disebutkan bahwa beberapa elit PDI Perjuangan kabupaten Tabanan mempunyai latar belakang yang boleh dikatakan frustrasi. Ada tokoh yang sebelum reformasi berprofesi sebagai *bebotoh tajen* (penjudi adu ayam) tetapi kini menjadi elit partai. Ada juga tokoh yang sebelumnya berprofesi sebagai sopir truk, meski dia lulusan perguruan tinggi dan kini menjadi anggota dewan, ada juga yang menjadi calo kendaraan. Disebutkan juga ada elit yang

perlatar belakang pengangguran, dipandang berandalan oleh masyarakat yang membentuk kelompok sesama pengangguran. Ketika terjadi kerusuhan antar partai yang melibatkan partai PDI Perjuangan, beberapa pihak bisa mengenali bahwa simpatisan partai yang melakukan serangan itu merupakan anak buah atau berasal dari tokoh seperti yang dikatakan diatas.

Salah seorang anggota satuan Polres Tabanan, WT, menyebutkan bahwa dalam konflik antara PDI Perjuangan dengan PNBK di Tegalinggah unjuk berasal dari seorang pegawai swasta. Pegawai ini dikenal mempunyai pengikut yang secara sosial bisa disebut termarginalkan. Menurut catatan pihak kepolisian, pelaku-pelaku kerusuhan yang terjadi di Tunjuk serta Pesiapan, berasal dari golongan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, petani atau tidak memiliki pekerjaan. Demikian juga konflik antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan di Selabih dikenal sebagai konflik yang melibatkan anak buah anak buah elit partai yang sebelumnya berprofesi sebagai penjudi.

### 5.3.2. Budaya Simbolik

Dalam hubungan ini, perlu juga dimasukkan unsur budaya lokal simbolik yang mempengaruhi intensitas konflik. Secara kultural masyarakat Bali, terutama yang berada di pedesaan, masih memegang semboyan gotong royong yang disebut dengan *segalak, segilik, seguluk salunglung sabayantaka*. Semboyan ini bisa diterjemahkan dengan saling asah-saling asih dan saling asuh, senasib sepenenderitaan bersama-sama. Melalui slogan tersebut., tindakan kebersamaan, gotong royong dan satu nasib tersebut diaktualisasikan. Hampir sama dengan itu, dalam budaya

pengambilan keputusan rapat adat, sering kali muncul kebiasaan negatif yang berupa *suryak siu* yang bisa dimaknai sebagai persetujuan secara serempak tanpa mengetahui makna kesepakatan yang diutarakan. Asal temannya sepakat, rekan yang lain juga langsung menyatakan persetujuan. Slogan seperti ini seolah mendapatkan penguat dengan semboyan “pantare” yang dipakai oleh simpatisan PDI Perjuangan dalam melakukan tindakannya. “Pantare” ini merupakan slogan yang mengidentifikasikan perjuangan partai mirip dengan aliran air. Perjuangan tidak hanya dilakukan di lapisan tertentu saja tetapi juga dilakukan pada lapisan-lapisan lain. Solidaritas kemudian menjadi bentuk tindakan dari perjuangan PDI Perjuangan.

Dengan perpaduan antara konsep gotong royong tersebut dipadukan dengan “pantare”, dan *suryak siu* maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh massa akar rumput PDI Perjuangan menjadi serempak dan cepat. Penafsiran keliru dari budaya lokal ini akan mampu memicu konflik. Setiap gangguan yang dilakukan oleh massa partai ini, di berbagai tempat di kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum 2004 tersebut, dilakukan secara bersama-sama dan serempak dari berbagai daerah. Menurut satu aktivis partai yang berasal dari kelompok akar rumput, asal mendengar adanya gangguan yang diterima oleh partai atau tokoh partai, mereka akan serempak datang ke tempat bersangkutan. Informasi ini bisa didengar melalui mulut ke mulut, kabar angin maupun melalui media elektronik dan media komunikasi modern seperti telepon seluler. Hal ini pula yang membuat simpatisan yang melakukan tindakan kekerasan tersebut bisa berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Tabanan. Bahkan ada kesan bahwa ada perputaran pengerahan massa jika hal itu harus digunakan untuk menghadapi hal yang dipandang mengganggu eksistensi partai. Perputaran ini

bisa berupa giliran untuk mengelabui lawan. Artinya tidak mungkin massa PDI Perjuangan dari desa tertentu akan bergerak untuk menghadapi persoalan partai pada desa yang bersangkutan. Hal inilah yang membuat bahwa hampir semua elit partai yang menjadi korban kekerasan PDI Perjuangan tidak mengenal orang-orang yang datang melempari rumahnya atau mencabut bendera partai kompetitornya. Jikapun mengenal hampir dipastikan orang tersebut berasal dari wilayah yang jauh dari wilayah konflik. Slogan budaya seperti yang disebutkan diatas, banyak membuat simpatisan partai yang berasal dari satu desa bergerak secara bersama-sama

Dengan kondisi kualifikasi massa akar rumput seperti itu, PDI Perjuangan memang mengakui kesulitan untuk mengontrol massanya di tingkat akar rumput.